



Media: BERNAS

Hari: Jumat

Tanggal: 07 Agustus 2015

Halaman: 10

Haryadi Pakta Integritas Danais

JOGJA -- Walikota Yogyakarta menandatangani Pakta Integritas berkaitan dengan pelaksanaan Dana Keistimewaan dihadapan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Daerah Triwulan II DIY di Ruang Borobudur, Hotel Garuda, Kamis (6/8). Selain Walikota Yogyakarta Pakta integritas ini juga ditandatangani oleh perwakilan dari empat kabupaten lain di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam pakta integritas yang berisi komitmen pemerintah daerah dalam pelaksanaan Dana keistimewaan tahun 2015 ini, Walikota menyatakan tidak akan melakukan praktek Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN), tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung, menghindari pertentangan kepentingan serta komitmen untuk menerapkan transparansi dalam setiap kegiatan. Untuk Kota Jogja, anggaran Dana Keistimewaan yang dilaksanakan sebesar Rp 32,02 miliar yang terbagi pada urusan kebudayaan 7 program, urusan pertanian 1 program, dan urusan tata ruang 2 program.

Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono dalam sambutannya mengatakan, dinamika pemerintahan saat ini menuntut adanya akuntabilitas dalam setiap aspek pelaksanaannya sebagai satu prasarat penting good governance sebagai proses transformasional yang dinamis, bermanfaat dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Kalau tidak berhati-hati, kinerja pemerintah bisa terhambat adanya kasus hukum yang harus dihadapi oleh sejumlah pejabat," kata Sri Sultan.

Sementara itu berkaitan dengan Dana Keistimewaan, Gubernur berpesan kepada Walikota dan Bupati agar kebudayaan mampu menjadi mainstream dalam berbagai aspek pembangunan dan alokasi dana keistimewaan selayaknya mampu membentuk peradaban baru.

"Saya berpesan kepada Walikota dan Bupati, anggaran dana keistimewaan jangan sampai mematkan nilai-nilai lokalitas yang luhur seperti gotong royong dan guyub rukun, ketulusan dan saling menghargai, bukan sebaliknya," kata Sri Sultan.

Pada akhir pengarahannya, Sri Sultan mengapresiasi sejumlah SKPD yang sudah melaksanakan program kegiatan sesuai perencanaan, kepada SKPD yang belum optimal untuk segera berbenah agar pada triwulan selanjutnya bisa dicapai secara lebih baik, efektif, efisien dan berdaya guna.

"Pelaksanaan yang baik adalah pelaksanaan yang dilakukan sebagaimana perencanaan, dan memiliki benang merah yang nyata terhadap pencapaian kinerja, masyarakat butuh aksi nyata dari saudara-saudara," kata Sri Sultan HB X. (*/fir)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Inspektorat	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 25 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005